

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2010-2012

Ni Ketut Erna Rahmawati¹
I Wayan Putra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali - Indonesia
e-mail: ernawisnujana@yahoo.com / telp: +62 81 353 674 648

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali - Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Variable yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas penerimaan PAD, rasio efisiensi belanja daerah, rasio pertumbuhan, rasio proporsi, dan rasio ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat *proporsi* pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 - 2012 tergolong ekonomis.

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, APBD, dan rasio keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of Sumbawa district government fiscal year 2010-2012. Variable used are the ratio of the area of financial independence, acceptance of PAD effectiveness ratio, the ratio of the efficiency of public expenditures, growth ratio, ratio of proportions and economic ratio. Results of this study showed that the level of financial independence is very low once Sumbawa district, the average level of effectiveness PAD from 2010-2012 which means less effective, the average level of financial efficiency Sumbawa regency of were classified as inefficient, average revenue growth rate showed positive growth. The largest contribution to revenue area is Fund Balance, while the largest contribution to the shopping area is occupied by indirect expenditures, and the average level of local government expenditure Sumbawa classified as economically.

Keywords: Financial performance area , budget and financial ratios

PENDAHULUAN

Pada masa-masa terjadinya krisis global, semua pihak yang terkait baik pemerintah indonesia maupun masyarakat berusaha untuk menanggulangi/mengatasi masalah krisis global tersebut dengan jalan melakukan

perbaikan dan pembenahan pada berbagai bidang. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah melalui jalan berusaha untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Sudjiarto (2000), berpendapat bahwa faktor-faktor *good governance* adalah keterbukaan, peningkatan efisiensi, tanggung jawab yang lebih jelas, dan kewajaran.

Laporan keuangan merupakan suatu alat akuntabilitas utama pemerintah yang digunakan dan difungsikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti: investor, kreditor, maupun masyarakat luas. Lembaga keuangan pusat mengadaptasi dan memanfaatkan sistem akuntabilitas keuangan untuk mengontrol keuangan (Kelly & John, 2000). Menurut Kluvers (2010), akuntabilitas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam hal pengungkapan serta pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di Indonesia laporan pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan kreditor. Berdasarkan laporan APBN/APBD tersebut, pihak parlemen, investor, kreditor, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dapat dengan mudah menilai kinerja pemerintah tersebut. Namun, harus diakui bahwa di negara Indonesia

laporan keuangan maupun anggaran sektor publik belum dipandang memiliki dimensi politik dan manajerial yang strategis bagi pemerintah untuk menjual program walaupun parlemen dan rakyat memantau dan mengamati kinerja pemerintah (Harun, 2009: 53).

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indra Bastian (2001: 337) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada elemen indikator kinerja. Elemen indikator kinerja terdiri atas lima elemen yaitu: 1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu baik berupa dana, sumber daya manusia, maupun informasi yang diperlukan dalam menjalankan /melaksanakan kegiatan demi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 2) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik berupa barang maupun jasa. 3) Indikator hasil (*outcome*) adalah hasil suatu kegiatan yang dapat diterima/dirasakan secara langsung oleh pihak lain/masyarakat dalam jangka menengah. 4) Indikator manfaat (*benefit*) adalah manfaat yang dapat

dirasakan secara langsung oleh masyarakat/pihak lain atas hasil kerja pemerintah atau organisasi tertentu. 5) Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Indikator dampak, misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengukuran pendapatan masyarakat.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Indra Bastian (2001: 330), pengukuran kinerja adalah suatu cara yang digunakan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik melalui pengukuran keuangan maupun non keuangan.

APBD yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan memiliki fungsi penting bagi pemerintah diantaranya yaitu: sebagai sarana dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakatnya atas segala kegiatan dan hasil kerja pemerintah selama periode tertentu, sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan atau pertumbuhan daerahnya pada

setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahunan berikutnya, dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya (Kurniati, 2012). Menurut Khalad *et al* (2011) menyatakan bahwa ada beberapa manfaat dari analisis rasio keuangan antara lain: dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengatur standar ukuran kinerja, dapat digunakan untuk menilai masa depan dan kredit/profitabilitas organisasi. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengukur efisiensi pendapatan daerah, mengukur seberapa besar tingkat pendapatan daerah yang telah diperoleh serta tingkat belanja daerah yang telah dilakukan pada setiap periode, mengukur tingkat ekonomis pemerintah dalam menggunakan dana belanjanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

Menurut Chen (2012) ada beberapa manfaat pengukuran kinerja diantaranya yaitu: memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan

untuk menilai kinerja manajemen, untuk mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, serta sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Government Accounting Standard Board (GASB) dalam *Concept Statement No.2*, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator yaitu: 1) Indikator pengukuran *Service Effort Service Effort* berarti bagaimana memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau pelayanan. 2) Indikator pengukuran *Service Accomplishment Service Accomplishment* diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan/program tertentu yang telah dilaksanakan. 3) Indikator yang menghubungkan antara *effort* dan *accomplishment* Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memberikan hasil (*output*) yang diharapkan (Ishak, 2009).

Sebagai gambaran awal mengenai APBD, pada Tabel 1 disajikan data mengenai perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2010-2012.

Dari Tabel 1 di bawah dapat diketahui bahwa anggaran Pendapatan Daerah dari tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan berturut-turut sebesar Rp 663,27 miliar, Rp 839,72 miliar dan Rp 856,86 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan berturut-turut dari tahun 2010-2012

sebesar Rp 42,11 miliar, Rp 97,24 miliar dan Rp 71,47 miliar. Di samping itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa dari tahun 2010-2012 berturut-turut sebesar Rp 722,79 miliar, Rp 870,66 miliar dan Rp 929,43 miliar. Sementara itu, untuk pembiayaan netto sendiri berfluktuasi dari tahun 2010-2012 sebesar Rp Rp 59,52 miliar, tahun 2011 Rp 40,96 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp 72,57 miliar.

Tabel 1.
Gambaran APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Data	Keterangan			
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Neto
2010	Anggaran	663,27	42,11	722,79	59,52
	Realisasi	660,43	35,81	666,84	59,60
2011	Anggaran	839,72	97,24	880,67	40,96
	Realisasi	837,08	89,05	798,57	43,13
2012	Anggaran	856,86	71,47	929,43	72,57
	Realisasi	848,09	60,99	551,49	75,04

Sumber: APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa, data diolah (2012)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio pertumbuhan, rasio proporsi dan rasio ekonomi APBD tahun anggaran 2010-2012?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas,

rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio proporsi dan rasio ekonomis APBD pada tahun anggaran 2010-2012.

Tingkat kemandirian daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya termasuk pengembangan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat luas, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah termasuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Menurut Halim (2007: 232), formula untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \% \dots\dots\dots 1$$

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2007: 232)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007: 234) yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapan}} \times 100\% \dots\dots\dots 2$$

Kriteria efektifitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup efektif
75 – 89	Kurang efektif
< 75	Tidak efektif

Sumber : Mahmudin (2011: 171)

Rasio efisiensi pendapatan daerah merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Untuk menghitung efisiensi pendapatan daerah, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots 3$$

Kriteria penilaian kinerja efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Kriteria Efisiensi Penilaian Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Tidak efisien
Sama dengan 100	Efisien berimbang
Di bawah 100	Efisien

Sumber: Mahmudi (2011: 171)

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang dipakai untuk menghitung seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah dalam menstabilkan serta meningkatkan kesuksesan yang telah diperoleh dari satu period ke-periode selanjutnya. Dalam

Halim (2007: 241), formula untuk mengukur rasio pertumbuhan dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} 100\% \dots\dots\dots 4$$

Keterangan:

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke – n

P_o = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal

Analisis *share* merupakan suatu bentuk analisis yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya serta pengalokasian dananya dalam bentuk pengeluaran (belanja daerah). Menurut Halim (2007: 347), proporsi pendapatan dan belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Share = \frac{Pendapatan\ dalam\ APBD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\% \dots\dots\dots 5$$

Proporsi pengeluaran (belanja daerah) dapat dihitung dengan rumus:

$$Share = \frac{Pengeluaran\ dalam\ APBD}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\% \dots\dots\dots 6$$

Rasio ekonomi merupakan rasio yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan juga memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam satu periode anggaran. Rasio ekonomi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat meminimalisir *input* dengan mencegah terjadinya pemborosan terhadap pengeluaran. Rasio ekonomi dapat dijabarkan dengan rumus berikut (Mardiasmo , 2009: 36).

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots 7$$

Kriteria penilaian ekonomi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak ekonomis
Sama dengan 100	Ekonomis Berimbang
< 100	Ekonomis

Sumber: Mardiasmo (2009: 36)

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya dapat memberikan gambaran pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai teori akuntansi sektor publik serta dapat mengaplikasikan teori akuntansi publik yang diperoleh di bangku kuliah dalam kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memahami kondisi keuangan daerahnya agar dapat merumuskan strategi kebijakan yang tetap untuk meningkatkan kinerja pengelolaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang ibukotanya adalah Sumbawa Besar. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari tiga Kabupaten yang ada di pulau Sumbawa diantaranya Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sumbawa karena kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang besar namun pertumbuhan dan perkembangan daerah serta masyarakat sekitarnya masih belum mengalami peningkatan. Selain itu, belum ada yang melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa. Sehingga peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah Kabupaten Sumbawa dengan mengkaji kinerja keuangan Kabupaten Sumbawa sehingga dapat memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke arah yang lebih baik.

Jenis data dalam penelitian ini diantaranya: data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka serta dapat pula dinyatakan dalam satuan hitung (Sugiyono, 2007: 140). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Data kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka-angka tetapi berupa keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan (Sugiyono, 2007: 14). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah struktur organisasi dan penjelasan/gambaran umum tentang instansi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yakni data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2010-2012.

Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) rasio kemandirian rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya termasuk pengembangan /peningkatan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat luas, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah termasuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. 2) rasio efektifitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan. 3) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil maksimal yang diperoleh dalam suatu kegiatan dengan penggunaan input yang minimum/terbatas. 4) rasio pertumbuhan adalah rasio yang dipakai untuk menghitung seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah dalam menjaga/menstabilkan serta meningkatkan kesuksesan yang telah diperoleh dari satu period ke periode selanjutnya. 5) rasio proporsi adalah analisis yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya serta pengalokasian dananya dalam bentuk pengeluaran (belanja daerah). 6) rasio ekonomi adalah analisis yang menunjukkan pengelolaan biaya secara hati-hati dan cermat sehingga tidak terjadi pemborosan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang ingin diteliti serta melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Obyek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumbawa Tahun anggaran 2010-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas terhadap PAD, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio pertumbuhan, rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah, serta rasio ekonomi. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode analisis yang ditujukan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan atau menghimpun data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan serta membandingkan kinerja keuangan pada APBD sesuai dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya termasuk pengembangan/peningkatan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat luas, yang diukur dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah.

Untuk mengetahui persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012, maka disajikan hasil perhitungan pada Tabel 6 berikut ini.

Berdasarkan Tabel 6 di bawah ini, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010-2012 berturut-turut adalah sebesar 5,42%, 10,64%, dan 7,19%. Sesuai dengan Tabel 2

maka dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 berada pada tingkat kemandirian dengan interval 0-25%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempunyai pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat memegang peranan yang lebih besar dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah. Sehingga daerah Kabupaten Sumbawa dikatakan belum mampu melakukan otonomi daerah secara finansial karena kemampuan daerahnya tergolong dalam kategori rendah sekali.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2010-2012 sebesar 7,75% yang tergolong dalam pola hubungan yang instruktif atau termasuk dalam kategori rendah sekali, dimana peran pemerintah pusat sangat besar dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah.

Tabel 6.
Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2010-2012

Tahun Anggaran (1)	Realisasi PAD (2)	Realisasi Pendapatan Daerah (3)	Kemandirian (%) (4) = (2) : (3)
2010	35.809.035.049	660.428.377.995,30	5,42
2011	89.055.715.571,60	837.080.583.562,25	10,64
2012	60.997.729.531,64	848.097.391.056,64	7,19
Rata-rata rasio kemandirian			7,75

Sumber: data diolah (2012)

Rasio efektifitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Untuk mengetahui persentase tingkat efektifitas PAD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012, maka disajikan hasil perhitungan pada Tabel 7 berikut ini.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa rasio efektifitas PAD tahun anggaran 2010-2012 secara berturut-turut sebesar 85,03%, 91,59% dan 85,35%. Sesuai dengan Tabel 3 tentang kriteria efektifitas kinerja keuangan, maka dapat diketahui tingkat efektifitas PAD Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 dan 2012 tergolong kurang efektif karena berada pada interval 75%-89%. Sedangkan untuk tahun 2011 tergolong cukup efektif karena berada pada interval 90%-99%.

Tabel 7.
Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3)
2010	35.809.035.049	42.111.006.657	85,03
2011	89.055.715.571,60	97.236.896.920,05	91,59
2012	60.997.729.531,64	71.468.220.437,19	85,35
	Rata-rata rasio efektifitas		87,32

Sumber: data diolah (2012)

Berdasarkan rasio masing-masing anggaran di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efektifitas PAD untuk tahun anggaran 2009-2011 adalah sebesar 87,32% yang tergolong kurang efektif karena berada pada interval 75%-89%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tergolong kurang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Analisis efisiensi bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pelaksanaan suatu program dengan cara melakukan pengukuran perbandingan

terhadap *input* yang digunakan dengan *output* yang diperoleh. Untuk mengetahui persentase tingkat efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012, maka disajikan hasil perhitungan pada Tabel 8 berikut ini.

Berdasarkan Tabel 8 di bawah, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi pendapatan daerah kabupaten Sumbawa berfluktuasi dari tahun 2010-2012 yakni sebesar 100,97%, 95,39% dan 109,59%. Dari masing-masing rasio tersebut diperoleh rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2010-2012 sebesar 101,98% yang berarti bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien karena berada pada interval >100%.

Tabel 8.
Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2010-2012

Tahun	Realisasi belanja daerah(Rp)	Realisasi pendapatan daerah (Rp)	Rasio efisiensi %	kriteria
2010	666.841.053.313,88	660.428.377.995,30	100,97	Tidak efisien
2011	798.572.686.424,55	837.080.583.562,25	95,39	Efisien
2012	929.427.076.837,05	848.097.391.056,64	109,59	Tidak efisien
Rata-rata			101,98	Tidak efisien

Sumber: data diolah (2012)

Rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah dalam menstabilkan serta meningkatkan kesuksesan yang telah diperoleh dari satu period ke-periode selanjutnya. Pada Tabel 9 berikut disajikan perhitungan rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012.

Berdasarkan Tabel 9 maka dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2011 terhadap tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 79,56%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 319,75%, sedangkan pertumbuhan PAD terkecil terjadi pada lain-lain PAD yaitu sebesar 23,83%. Pada tahun 2012 rata-rata pertumbuhan PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 35,49%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pajak daerah sebesar 14,39% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebesar -80,62%.

Tabel 9.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012

No	Sumber PAD	Tahun Anggaran			Rata-rata (%)
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	
1	Pajak daerah	(0,14)	79,56	14,39	31,27
2	Retribusi daerah	10,31	40	89,07	46,46
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan	169,96	319,75	(80,62)	136,36
4	Lain-lain PAD	(25,5)	23,83	39,55	12,63
	Rata-rata pertumbuhan	38,66	115,78	15,59	56,68

Sumber: data diolah (2012)

Analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan belanja daerah. Pada Tabel 10 berikut disajikan perhitungan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.

Tabel 10.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun Anggaran	Realisasi	Rasio Pertumbuhan
----	----------------	-----------	-------------------

		(dalam miliar rupiah)	(%)
1	2010	445,39	17,37
2	2011	464,47	4,28
3	2012	551,49	18,73
Rata-rata			13,46

Sumber; data diolah (2012)

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan untuk tahun 2011 sebesar 4,28% dan tahun 2012 sebesar 18,73%. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tahun anggaran 2010-2012 sebesar 13,46% yang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11.
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun Anggaran	Realisasi (dalam miliar rupiah)	Rasio pertumbuhan (%)
1	2010	221,45	(1,67)
2	2011	334,11	50,87
3	2012	299,95	(10,22)
Rata-rata			12,99

Sumber: data diolah (2012)

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan untuk tahun 2011 sebesar 50,87% dan tahun 2012 sebesar -10,22%. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk tahun anggaran 2010-2012 sebesar 12,99% yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tingginya persentase pertumbuhan belanja langsung disebabkan karena adanya peningkatan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Analisis proporsi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya serta pengalokasian

dananya dalam bentuk pengeluaran (belanja daerah). Pada Tabel 12 berikut disajikan hasil perhitungan pertumbuhan proporsi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 secara berurutan proporsi pendapatan daerah yang terbesar bersumber dari dana perimbangan sebesar 82,11%, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,47% dan PAD sebesar 5,42%. Pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 72,17%, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 17,19% dan PAD sebesar 10,64%.

Proporsi rata-rata pendapatan daerah dari tahun 2010-2012 berturut-turut sebesar 7,75% untuk PAD, dana perimbangan 78,77% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 13,47%. Proporsi pendapatan daerah yang terbesar berasal dari dana perimbangan yang disebabkan oleh realisasi penerimaan DAU, DAK dan dana bagi hasil yang cukup tinggi.

Analisis proporsi terhadap pengeluaran bertujuan untuk menilai tingkat proporsi dari setiap komponen belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sehingga dapat diketahui apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya serta memberikan pelayanan publik yang memadai. Pada Tabel 13 berikut disajikan hasil perhitungan proporsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.

Tabel 12.
Pertumbuhan Proporsi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.

No	Sumber Pendapatan	Proporsi (%)		
		2010	2011	2012
1	PAD	5,42	10,64	7,19
	a. Pajak daerah	0,89	1,26	1,43
	b. Retribusi daerah	1,56	1,73	3,22
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,04	6,74	1,29
	d. Lain-lain PAD yang sah	0,93	0,91	1,25
2	DANA PERIMBANGAN	82,11	72,17	82,05
	a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	7,48	5,92	5,48
	b. Dana alokasi umum	66,07	59,24	69,11
	c. Dana alokasi khusus	8,56	7,01	7,46
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12,47	17,19	10,76
	a. Hibah	-	-	0,07
	b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	3,01	1,82	2,16
	c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	9,08	15,1	8,6
	d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,38	0,27	0,02
Total Pendapatan		100	100	100

Sumber: data diolah (2012)

Berdasarkan Tabel 13 di bawah ini, dapat dilihat bahwa proporsi belanja tidak langsung dari tahun 2010-2012 lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi belanja langsung. Proporsi belanja tidak langsung dari tahun 2010-2012 berturut-turut sebesar 66,79% , 58,16% dan 64,78%. Proporsi terbesar untuk belanja tidak langsung adalah berasal dari belanja pegawai. Sedangkan proporsi belanja langsung pada tahun anggaran 2010-2012 berturut-turut sebesar 33,21% , 41,84% dan 35,22% . Proporsi terbesar untuk belanja langsung berasal dari belanja modal yang besarnya berturut-turut dari tahun 2010-2012 adalah sebesar 14,53% , 21,5% dan 15,05%. Rata-rata proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun anggaran 2010-2012 adalah sebesar 63,24% dan 36,76%.

Berdasarkan Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa proporsi belanja terbesar berasal dari belanja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian penuh pada para pegawainya. Hal ini disebabkan karena adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mensejahterakan para pegawainya. Sementara itu, proporsi belanja langsung yang terbesar berasal dari belanja modal.

Tabel 13.
Perhitungan Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	Proporsi (%)		
		2010	2011	2012
1	Belanja Tidak Langsung	66,79	58,16	64,78
	a. Belanja pegawai	56,65	51,25	55,63
	b. Belanja subsidi	0,04	-	-
	c. Belanja hibah	4,43	1,21	4,7
	d. Belanja bantuan social	1,17	1,5	0,75
	e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	0,05	0,04	0,03
	f. Belanja tidak terduga	-	0,05	0,03
	g. Belanja bantuan keuangan	4,45	4,11	3,64
2	Belanja Langsung	33,21	41,84	35,22
	a. Belanja pegawai	4,11	5,19	3,33
	b. Belanja barang dan jasa	14,56	15,15	16,84
	c. Belanja modal	14,53	21,5	15,05
	Total Belanja	100	100	100

Sumber: data diolah (2012)

Analisis ekonomi bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat meminimalisir input dengan mencegah terjadinya pemborosan terhadap pengeluaran. Tingkat ekonomis Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14.
Perhitungan Tingkat Ekonomis Belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Ekonomi (%)
1	2010	666.841.053.313,88	722.791.928.714,24	92,26
2	2011	798.572.686.424,55	880.673.749.379,36	90,68
3	2012	851.444.744.476,87	929.427.076.837,05	91,61
Rata-rata rasio ekonomi				91,52

Sumber: data diolah (2012)

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa rasio ekonomi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2012 berturut-turut sebesar 92,26%, 90,68% dan 91,61%. Sesuai dengan Tabel 2.6 maka dapat diketahui tingkat ekonomi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis karena berada pada interval $< 100\%$.

Berdasarkan rasio masing-masing anggaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio ekonomi untuk tahun anggaran 2010-2012 adalah sebesar 91,52% yang tergolong ekonomis karena berada pada interval $< 100\%$. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah baik dalam merealisasikan/menggunakan dana yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun anggaran 2010-2012 tergolong kurang baik. Hal itu dapat di lihat dari hasil perhitungan masing-masing pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut: 1) Tingkat kemandirian keuangan kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali

yaitu sebesar 7,75% yang berarti bahwa pemerintah pusat masih sangat memegang peranan besar dalam menunjang kegiatan perekonomian daerahnya. 2) Rata-rata tingkat efektifitas PAD dari tahun 2010-2012 sebesar 87,32% yang berarti kurang efektif, karena berada pada interval 75%-89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa tergolong kurang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. 3) Rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa selama tahun anggaran 2010-2012 sebesar 101,98% yang tergolong tidak efisien karena berada pada interval >100%. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. 4) Rata-rata tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2010-2012 sebesar 75,63% menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan PAD. Di samping itu, pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung juga memperlihatkan pertumbuhan yang positif. 5) Tingkat *proporsi* pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan sebesar 78,78%, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung sebesar 63,24%. 6) Rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 91,52% yang tergolong ekonomis karena berada pada interval <100%. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah baik dalam merealisasikan/menggunakan dana yang ada.

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa saran atau masukan yang dapat diberikan demi menunjang perkembangan serta meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan tingkat kemandirian Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah yang bersangkutan harus dapat menggali dan meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan PAD, sehingga tidak bergantung sepenuhnya lagi pada bantuan pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan. 2) Tingkat efektivitas PAD yang kurang efektif perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber PAD yang ada serta merealisasikannya dengan benar. 3) Tingkat efisiensi yang tidak efisien perlu ditingkatkan dengan cara lebih meningkatkan jumlah pendapatan daerah agar dapat sesuai atau seimbang dengan realisasi pengeluaran atau belanja daerah yang terjadi pada periode waktu tertentu. 4) Pada tingkat pertumbuhan, diharapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat lebih meningkatkan PAD agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. 5) Tingkat proporsi belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar sedapat mungkin mengurangi jumlah dana pada belanja pegawai dengan cara mengurangi pengangkatan pegawai baru serta lebih memberdayakan potensi pada pegawai yang sudah lama. 6) Tingkat belanja daerah yang tergolong ekonomis sudah baik namun perlu sedikit ditingkatkan lagi agar dapat menjadi lebih ekonomis dengan cara mengalokasikan

lagi dana yang ada pada sektor-sektor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

REFERENSI

- Amalia Mirza, Rifka. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arka, Sudarsana. 2010. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali., *Buletin Studi Ekonomi*,12(3): h:120-128.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta.
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Povinsi NTT. *Tesis Manajemen Universitas Udayana*.
- Ben Mahjoub, Lassaad and Khamoussi Halioui. 2012. The impact of Budget Participation on Organizational Performance via Competitiveness. *International Journal of Contemporary Business Studie*, 3(6): h:55-65.
- Bhunia, Amalendu., Sri Somnath Mukhuti & Sri Gautam Roy. 2011. Financial Performance Analysis-A Case Study. *Current Research Journal of Social Sciences* 3(3):h: 269-275.
- Cahya Diputra, Nyoman Gede. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2007-2009. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Denpasar.
- Chen, Tser-Yieth, Tsai-Lien Yeh and Mao-ming Chung. 2012. Financial Performance of Township Governments and its Four Budget Cycles. *African Journal of Business Management*. 6(2): h: 530-537.
- Curristina, Teresa. 2005. Government Performance: Lessons and Challenges. *OECD Journal on Budgeting*, 5(1): h: 89-97
- Ekawarna, Shita Unjaswati., Iskandar Sam., & Sri Rahayu. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

- Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1(2): h: 49-66.
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1): h: 1-6.
- Florenz C. 2012. A Comparative Analysis of the Financial Ratios of Listed Firms Belonging to the Education Subsector in the Philippines for the Years 2009-2011. *International Journal of Business and Social Science*,3(2): h:129-136.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba empat. Jakarta .
- Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*, 3(2): h:50-59.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat, Paudi., Wahyu Ario Pratomo., & D. Agus Harjito. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3): h: 100-106.
- Ishak, Muhammad.2009. kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi*, 6(3): h: 111-118.
- Jaya, Amir. 2005. Analisia Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja, 1(1): h: 1-7.
- Karacaer, Semra and Ayhan Kapsuzoglu. 2008. An Analysis of the Effect of Financial Ratios on Financial Situation of Turkish Enterprises Resulting from their Annual Operations. *International Research Journal of Finance and Economics*, 19(2): h: 275-283.
- Kelly, Joanne and John Wanna. 2000. New Public Management and The Politics of Government Budgeting. *Journal International Public Management*, 1(2): h: 12-20.
- Khalad, M.S.,Alrafadi., & Mazila Md-Yusuf. 2011. Comparison Between Financial Ratios Analysis and Balanced Scorecard. *American Journal of Economics and Business Administration*, 3 (4): h : 618-622.

- Kluvers, Ron. 2010. mechanism of Accountability I Local Government. *International Journal of Business and Management*, 5(7): h: 50-58.
- Kurniati, Siti. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Made Wiwin Surya Ningsih, Gusti Ayu. 2012. Penilaian Kinerja Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan untuk Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Mahmudi. 2007. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Maryane Sinaga, Beth. 2012. Penilaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2009-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Ogbulu, Onyemachi Maxwell and Lezaasi Lenee Torbira. 2012. Budgetary Operation and Economic Growth : The Nigerian Perspective. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 2(3): h: 48-56.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putu Purbadharmaja, Ida Bagus. 2007. Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Buletin Studi Ekonomi*, 12(3): h: 199-207.
- Ronald, andreas dan Dwi Sarmiyatiningsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1(1): h: 31-42.
- Sangkala, Azis. 2009. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Pabrik Roti Tony Bakery Pare-Pare. *Jurnal Ekonomi*, 1(2): h: 25-33.
- Schick, Allen. 2002. *Does Budgeting Have A Future ?*. *Journal on Budgeting*, 2(2): h: 60-68.
- Sudjiarto. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2): h: 138-145.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian. Bandung* : CV. Alfabeta.

Ulum Rusydi, Bahrul. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipnegoro. Semarang.

Wong, Christine. 2007. Budget Reform In China, 7(1): h: 56-65.

Yurdila Janur, Martha. 2009. Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.